



LAPORAN KINERJA

2023

SKIPM CIREBON

Jl. Cideng Indah No. 236a, Kedawung - Cirebon



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

KANTOR & LABORATORIUM : JL. CIDENG INDAH NO.236 A
KEDAWUNG CIREBON TELP/FAX (0231)-248857
LAMAM www.kkp.go.id SUREL op.skipmcirebon@kkp.go.id

Nomor : B. 108/SKIPM.CRB/TU.210/I/2024 15 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Tahun 2023

Yth. Sekretaris Badan KIPM
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun 2023, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 atas capaian indikator kinerja yang pelaksanaan kegiatan/komponennya telah diselesaikan selama periode Tahun 2023. Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja Tahun 2023 beserta lampirannya berupa Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023 dan Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2023.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun KIPM Cirebon



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

R. Rudi Barmara

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Cirebon Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja setiap entitas atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam PK dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Stasiun KIPM Cirebon ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan masyarakat dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Landasan penyusunan LKj adalah Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 dan Target Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 beserta realisasinya. Secara umum, pada Tahun 2023 sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai dengan kategori **Baik**.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Cirebon, 12 Januari 2024

Kepala,

R. Rudi Barmara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon dalam rencana kinerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Badan KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, Stasiun KIPM Cirebon mempunyai empat Sasaran Strategis dan 24 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen revisi terakhir Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, Stasiun KIPM Cirebon telah mengukur empat Sasaran Strategis (SS) dengan 24 IKU/IK tersebut. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian skor kinerja IKU/IKS Tahun 2023 adalah 107,65. Secara keseluruhan skor kinerja IKU/IKS Tahun 2023 sebesar **107,65** atau masuk dalam kriteria **Baik** (hijau), yaitu sebanyak 24 IKU/IKS yang diukur telah mencapai/melebihi target.

Tabel 1. Capaian IKU/IKS Stasiun KIPM Cirebon yang diukur pada akhir periode Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2023	DESEMBER	DESEMBER	
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara profesional dan partisipatif						104,13	
1	IKS.1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98	98	100	102
2	IKS.2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
3	IKS.3	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9	9	9	100

4	IKS.4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	1	100	
5	IKS.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90	90	100	111	
6	IKS.6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100	
7	IKS.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	100	109	
8	IKS.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9	9	10	111	
S.02		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						112		
9	IKS.02.1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	sertifikat	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	31	120	
10	IKS.02.2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	3	3	100	
11	IKS.02.3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	UPI	Maximize	Nilai Posisi Akhir	8	8	8	100	
12	IKS.02.4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	produk	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55	55	113	120	
13	IKS.02.5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	Maximize	Nilai Posisi Akhir	18	18	24	120	
S.03		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						104,23		
14	IKS.03.1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	94,68	113	
15	IKS.03.2	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	parameter	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100	

16	IKS.03.3	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100
S.04		Tata kelola pemerintahan yang baik						110,22	
17	IKS.04.2	Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	88,61	105
18	IKS.04.3	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Cirebon	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	97,45	115
19	IKS.04.4	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
20	IKS.04.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	100	120
21	IKS.04.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	93,75	96,98	103
22	IKS.04.7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	89,32	109
23	IKS.04.8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	81,66	105
24	IKS.04.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	99,38	120

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp8.629.187.472,00 atau 96,39% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp8.952.427.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp323.239.528,00 atau 3,61%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan SMART DJA dari Kementerian Keuangan 96,98 dan 89,32. Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Manajemen Kinerja agar melakukan pemantauan atau evaluasi capaian kinerja organisasi tahunan. Selain itu komitmen dan tanggung jawab secara bersama baik pimpinan maupun seluruh pegawai lingkup Stasiun KIPM Cirebon diharapkan dapat mendukung kinerja BPPMHKP yang lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Arah Kebijakan dan Strategi	2
	C. Dasar Hukum	4
	D. Tugas dan Fungsi	4
	E. Agenda SKIPM Cirebon	5
	F. Dasar Pengukuran Kinerja	5
	G. Tujuan Pengukuran Kinerja	6
	H. Ruang Lingkup	6
	I. Waktu Pengukuran Kinerja	6
	J. Metodologi Pengukuran Kinerja	6
	K. Sistematika Penyajian	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
	A. Rencana Strategis 2020 -2024	8
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2021	10
	C. Penetapan Kinerja Tahun 2021	12
	D. Program dan Kegiatan Tahun 2021	14
	E. Rencana Aksi Pencapaian IKU	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Pengelolaan Kinerja	16
	B. Capaian Kinerja	17
	C. Realisasi Rencana Aksi	56
	D. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	57
	E. Analisis Capaian Kinerja	57
BAB IV	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Permasalahan	61
	C. Rencana Perbaikan	61
	D. Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Tahun 2022	62
LAMPIRAN		63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon wajib melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Cirebon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan motivasi dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Cirebon dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Ketua Tim Kerja, Jabatan Fungsional Tertentu, JF Umum, dan PPNPN.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Stasiun KIPM Cirebon saat ini berjumlah 47 orang pegawai terdiri dari 34 PNS dan 13 PPNPN, baik yang membidangi teknis maupun administrasi. Distribusi pegawai yang berimbang ini

diperlukan dalam membentuk tim kerja yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Cirebon juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Struktur organisasi Stasiun KIPM Cirebon tergambar sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Cirebon

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Cirebon disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan strategi SKIPM Cirebon sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM Tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan

kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

C. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Cirebon mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
4. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
8. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
9. Pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

10. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
11. Pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
12. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
13. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
14. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
15. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
16. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

E. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. KKP melalui BKIPM dan UPT nya, melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian mutu;
2. Karantina Ikan;
3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan; dan
4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

F. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.
4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP sebagaimana Revisi terakhir tanggal 7 November 2023.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 Nomor : SP DIPA-032.13.2.649732/2024 tanggal 24 November 2023.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Tahun Anggaran 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja TA 2023.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Kepala Badan KIPM KKP.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang diukur : Januari s.d. Desember 2023
2. Waktu pengukuran : 3 s.d. 10 Januari 2024

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2023.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2023.

K. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, capaian kinerja Tahun 2023, dan realisasi rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023;
- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Renstra Badan KIPM 2020-2024 menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun usulan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Matriks Peran Hasil (MPH) di lingkungan BKIPM dan KKP.

Visi KKP untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Adapun visi – misi BKIPM dan Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Renstra 2020 – 2024 dan turunannya, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Stasiun KIPM Cirebon “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” yang mengacu pada visi BKIPM dan KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”. Visi tersebut dalam rangka mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain.

2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui

Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (3) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BKIPM yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan KKP yaitu dengan :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
- c. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Pada Tahun 2023, mengacu Sasaran Kegiatan BKIPM Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 4 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif;
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif;
- c. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif; dan
- d. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Pengendalian Mutu**. Rincian outputnya adalah :

- a. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- b. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan (5 lembaga);
- c. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya (1 produk);
- d. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (55 produk);
- e. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (3 produk);
- f. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* (8 Lembaga);

- g. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (18 Lembaga); dan
- h. Sarana pengujian mutu (1 unit).

2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Pada program ini, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Karantina ikan** dan **Standarisasi Sistem dan Kepatuhan** dengan alokasi anggaran. Adapun rincian outputnya adalah :

a. Karantina ikan :

- 1) Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (9 rekomendasi kebijakan);
- 2) Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif (2 rekomendasi kebijakan);
- 3) Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- 4) Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik (630 produk);
- 5) Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* (9 unit);
- 6) Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan (2 perkara); dan
- 7) Sarana pengawasan karantina (PNBP) sebanyak 7 unit.

b. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan :

- 1) Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik (1 lembaga);
- 2) Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- 3) Unit kerja yang menerapkan standar sistem manajemen (1 unit kerja);
- 4) Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu (440 orang); dan
- 5) Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan (1 unit kerja).

3. Dukungan manajemen

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama Dukungan Manajemen dengan rincian outputnya adalah :

- a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1 layanan);
- b. Layanan Umum (1 layanan);
- c. Layanan Perkantoran (1 layanan);
- d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan);
- e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan); dan
- f. Alat Pengolah Data dan Komunikasi (4 unit).

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	9
		4	Dokumen mitigasi risiko pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	92

Laporan Kinerja Tahun 2023

		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Unit)	9
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	8
		12	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (produk)	55
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	84
		15	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Parameter)	2
		16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (<i>Indeks</i>)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	85
		19	Persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	93,75
		22	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	77,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon(%)	77,5

D. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BKIPM, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 3 program teknis dan 1 dukungan manajemen, dengan rincian komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor;
2. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan;
3. Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan;
4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI;
5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik;
6. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Traceability;
7. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Identifikasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina (PIK);
9. Identifikasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang dan Bersifat Invasif (JABI);
10. Pencegahan Impor, Ekspor, Antar Area Jenis Ikan Yang di Larang, Dilindungi, dan Dibatasi di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang di Tetapkan;
11. Sertifikasi Kesehatan Ikan;
12. Pengawasan dan Pengendalian di IKI;
13. Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan;
14. Prasarana pengawasan karantina;
15. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM;
16. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan;
17. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran;
18. Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM;
19. Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan;
20. Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian sesuai standar;
21. Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025);
22. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
23. Layanan Umum dan Rumah Tangga;
24. Gaji dan Tunjangan;
25. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
26. Layanan Perencanaan dan Penganggaran; dan
27. Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database *online* www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B.128/SKIPM.CRB/KP.440/I/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara akumulasi dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 1. Rentang penilaian capaian kinerja

Sesuai dengan MPH Tahun 2023, Sasaran Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **24 IKU/IK** dengan target yang ditentukan sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terakhir pada tanggal 7 November 2023.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dari Januari sampai dengan Desember 2023. Capaian kinerja yang diukur selama Tahun 2023, target SS dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kerjanya dalam Tahun 2023. Target dan realisasi SS dan IKU Tahun 2023 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan IKU/IK yang diukur pada Tahun 2023

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) = 107,65

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	
					2023	TW IV	TW IV		
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara profesional dan partisipatif						104,13		
1	IKS.1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98	98	100	102
2	IKS.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
3	IKS.3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9	9	9	100
4	IKS.4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	1	100
5	IKS.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90	90	100	111
6	IKS.6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100

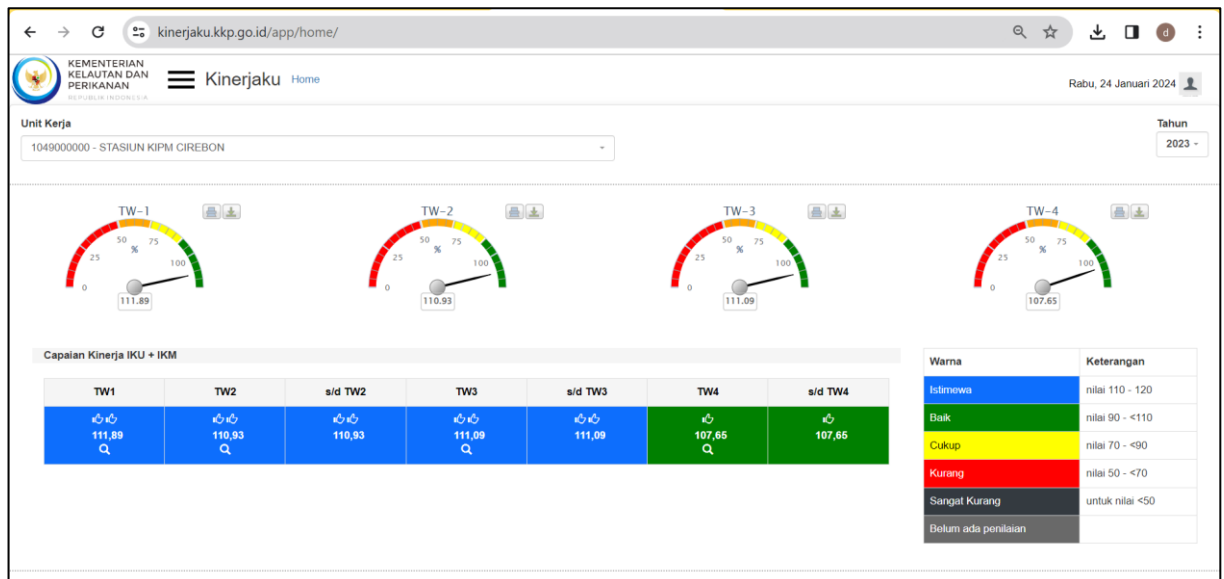
Laporan Kinerja Tahun 2023

7	IKS.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	100	109
8	IKS.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9	9	10	111
S.02		Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						112	
9	IKS.02.1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	sertifikat	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	31	120
10	IKS.02.2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	3	3	100
11	IKS.02.3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	UPI	Maximize	Nilai Posisi Akhir	8	8	8	100
12	IKS.02.4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	produk	Maximize	Nilai Posisi Akhir	55	55	113	120
13	IKS.02.5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	Maximize	Nilai Posisi Akhir	18	18	24	120
S.03		Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						104,23	
14	IKS.03.1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	94,68	113
15	IKS.03.2	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	parameter	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100
16	IKS.03.3	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	2	100
S.04		Tata kelola pemerintahan yang baik						110,22	
17	IKS.04.2	Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	88,61	105
18	IKS.04.3	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Cirebon	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	97,45	115
19	IKS.04.4	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
20	IKS.04.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	100	120
21	IKS.04.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	93,75	96,98	103

22	IKS.04.7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	89,32	109
23	IKS.04.8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	81,66	105
24	IKS.04.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,5	77,5	99,38	120

Keterangan: * Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Seluruh IKU dari 4 Sasaran Strategis (SS) Tahun 2023 telah dilakukan pengukurannya menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat disampaikan bahwa *dashboard* capaian kinerja IKU pada Tahun 2023 sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Triwulan 1 s.d. 4 Tahun 2023

Pada gambar tersebut, nilai capaian kinerja IKU Tahun 2023 mencapai nilai **107,65**; sebagaimana capaian kinerja IKU dan IK secara keseluruhan ditunjukkan dengan skor kinerja sebesar **107,65** yang masuk dalam kriteria **Baik** (hijau). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 24 IKU yang diukur pada Tahun 2023 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja SS yang dihasilkan

dari kinerja masing – masing IKU yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing – masing indikator dari masing-masing SS dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut :

SK 1.1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif dicapai dengan delapan IKU, yaitu :

1. Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%);
2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%);
3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi);
4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen);
5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%);
6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi);
7. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%); dan
8. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Unit).

IKU 1 : Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah rata-rata dari (jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan dikurangi penolakan oleh negara tujuan)/jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan) x 100% (A) dan (jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat mutu dikurangi penolakan oleh Negara tujuan)/Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan) x 100% (B). Periode pengukuran IKU ini triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 1 pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	100	99,70	99,76	98,00	100	102	98,00	102

Sumber : hasil pengolahan data ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Cirebon
 *) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Dari seluruh permohonan yang menerbitkan sertifikat kesehatan ikan (HC) ekspor pada Tahun 2023 sebanyak 953 sertifikat dan tidak terdapat notifikasi kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor atau realisasi persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 100% dari target 98,00%, sehingga capaian pada Tahun 2023 sebesar 102%. Keberhasilan capaian melebihi target kinerja sebesar 102% tersebut disebabkan meningkatnya kehati-hatian eksportir dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun quality produk, serta diterapkannya mitigasi risiko dalam pemenuhan persyaratan ekspor. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun quality produk.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar 98,00% setiap tahun (*stabilized*). Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian sama dengan capaian Tahun 2023. Realisasi anggaran atas komponen sertifikasi kesehatan ikan secara keseluruhan sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp147.692.334,00 dari pagu anggaran sebesar Rp189.000.000,00 atau 78,14% dari total anggaran yang tersedia. Hal tersebut disebabkan terdapat subkegiatan bersumber dana PNBPNP yang tidak dapat direalisasikan karena target penerimaan/PNBPNP yang tidak tercapai.

IKU 2 : Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona digunakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016 tentang Status Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah ada di dalam wilayah Indonesia. Indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (P) diukur dengan membandingkan jumlah jenis HPIK yang sudah ditemukan (A) dan jumlah jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas (B). Indikator persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (X) diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100\% ;$$

dengan A = Penyakit Ikan Karantina (PIK) yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara RI

B = PIK yang terdeteksi pada kegiatan lalu lintas domestik dan ekspor karantina di SKIPM Cirebon

Periode pengukuran IKU ini setiap semester dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU tersebut pada akhir Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	-	-	-	-	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil pengukuran mengacu Juknis yang relevan dan terkait.

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan pengawasan dan pengendalian selama Tahun 2023 berhasil mendeteksi tidak adanya penyakit ikan karantina pada kegiatan lalu lintas domestik dan ekspor karantina, melalui kegiatan

identifikasi/ analisis potensi pemasukan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi, pemantauan penyakit ikan karantina, identifikasi sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif (JABI), sehingga persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona mencapai 100%. Adapun upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman kepada pengguna jasa terkait persyaratan lalu lintas komoditi perikanan antar area (domestik keluar dan domestik masuk).

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2024, target IKU ditetapkan sebesar 100% atau sama dengan target Tahun 2023 yaitu 100%. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun 2023 sebesar 100%. Dalam hal capaian IKU tersebut, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2023.

IKU 3 : Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina merupakan lokasi kegiatan pemantauan/ monitoring sebaran hama dan penyakit ikan karantina di wilayah administratif Stasiun KIPM Cirebon yang terdiri dari 9 (sembilan) kota atau kabupaten, yaitu Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Sumedang, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Majalengka, dan Kota Cirebon. Periode pengukuran IKU ini per semester dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Capaian IKU tersebut sampai dengan Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	-	-	9	-	9	9	9	100	9	100

Sumber : Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 3 Tahun 2023 terealisasi 100% atau 9 dari target 9 lokasi yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja IKU sebesar 100% disebabkan adanya komitmen petugas karantina bersama *stakeholders* dalam melakukan pemantauan dan identifikasi lokasi sebaran penyakit ikan karantina di bawah wilayah administrasi Stasiun KIPM Cirebon. Adapun upaya nyata yang telah dilakukan oleh Stasiun KIPM Cirebon antara lain melakukan koordinasi baik dengan pihak internal dan eksternal (instansi terkait), sehingga tersusun data/bahan masukan penyusunan peta sebar Penyakit Ikan Karantina.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2024, target IKU ditetapkan sebesar 100% atau sama dengan target Tahun 2023 yaitu 100%. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun 2023 sebesar 100%. Dalam hal capaian IKU tersebut, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2023. Realisasi anggaran atas komponen ini pada Tahun 2023 mencapai Rp72.761.675,00 atau 95,14% dari pagu anggaran sebesar Rp76.480.000,00.

IKU 4 : Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen)

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalu lintas media pembawa HPIK/HPIK. Dokumen Mitigasi Risiko merupakan dokumen yang berupa Draft NSPK dan Kebijakan terkait Mitigasi Risiko serta laporan investigasi penyakit ikan pada kegiatan lalu lintas. Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian *outbreak*/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa. Periode pengukuran IKU ini

triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 4 Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100	1	100

Sumber : Laporan/dokumen mitigasi risiko Keg Investigasi HPI/HPIK Tahun 2023

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada Tahun 2023 tidak terdeteksi HPI/HPIK dari media pembawa yang dilalulintaskan. Dari data lalu lintas yang ada, pada Tahun 2023 tidak ditemukan adanya Penyakit Ikan Karantina. Kegiatan mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa telah dilaporkan ke Pusat secara berkala (laporan bulanan) sebesar 100%. Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 100% antara lain karena adanya tindakan pengendalian/ penanganan mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT oleh pemilik risiko Stasiun KIPM Cirebon berupa tindakan yang telah terencana dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya kegiatan berdasarkan manajemen risiko pada awal tahun.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU 5 baru ditetapkan mulai Tahun 2023 s.d. 2024. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka capaian per Tahun 2023 juga sebesar 100%. Pada Tahun 2023 realisasi anggaran atas komponen mitigasi risiko lalu lintas mencapai Rp2.000.000,00 atau 40% dari pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan sisa anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (60%) diperuntukkan pengujian sampel

ke laboratorium eksternal yang sumber dananya berasal dari PNPB. Adapun penerimaan PNPB Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 tidak tercapai sesuai target.

IKU 5 : Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)

Pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina merupakan bentuk pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Periode pengukuran IKU ini triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 5 pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

$X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$ <p>Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 = $(a-b)/a \times 100\%$</p> <p>X = Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantin X1 = pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi X2 = pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi X3 = pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi X4 = pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi a = jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi b = jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan yang tidak dapat dicegah di pintu pemasukan yang ditetapkan</p>

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 5 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	-	-	-	100	100	90	100	111,11	92	108,70

Sumber : % pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.
)angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 5 Tahun 2023 mencapai 111,11% atau terealisasi 100% dari target 90% menunjukkan bahwa tidak terdapat aktivitas pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi yang dilalulintaskan di wilayah Stasiun KIPM Cirebon, sesuai persyaratan karantina di lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon. Keberhasilan tersebut disebabkan meningkatnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Petugas Stasiun KIPM Cirebon di wilayah kerjanya dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan lalu lintas impor, ekspor dan antar area untuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi pengguna jasa mengenai persyaratan jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU 5 ditetapkan sebesar 92%. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka capaian per Tahun 2023 sebesar 108,70%. Pada Tahun 2023 realisasi anggaran atas komponen pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai Rp5.743.500,00 atau 82,05% dari pagu anggaran sebesar Rp7.000.000,00.

IKU 6 : Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)

Lokasi pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif dilaksanakan di perairan darat (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia. Periode pengukuran IKU ini semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 6 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (lokasi)	-	-	2	-	2	2	2	100	2	100

Sumber : Data lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon
 *) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi atas pelaksanaan pemantauan JABI selama semester II Tahun 2023 mencapai target 100%, yaitu mencakup 2 kabupaten sasaran, yaitu di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan teridentifikasinya sebaran jenis ikan yang dilarang dan/atau bersifat invasif di Kab. Pangandaran dan Kota Banjar selama Tahun 2023. Implikasi atas kegiatan ini adalah sebagai bahan masukan penyusunan peta sebar jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang teridentifikasi. Adapun upaya nyata yang telah dilakukan Stasiun KIPM Cirebon antara lain melakukan sosialisasi serta koordinasi internal dan eksternal (instansi terkait dan pelaku usaha perikanan khususnya ikan hias).

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU 6 ditetapkan sebanyak 2 lokasi. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian sama dengan capaian per Tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi anggaran atas komponen ini sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp23.580.870,00 atau 95,47% dari pagu anggaran sebesar Rp24.700.000,00.

IKU 7 : Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang muncul dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pelanggaran tersebut. Persentase pencapaian indikator tersebut diukur dengan membandingkan antara kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap pulbaket) dengan total kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang terjadi. Periode pengukuran IKU ini semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU tersebut pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	-	100	100	92	100	109	94	106

Sumber : Laporan hasil kegiatan penanganan kasus pelanggaran Tahun 2023.
Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon selama Tahun 2023 sebesar 100% dari target 92% atau capaian kinerja IKU sebesar 109%. Hal tersebut menunjukkan terselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu, dan keamanan hasil perikanan 100%. Pada Tahun 2023 terdapat satu penanganan atas kasus pelanggaran mutu hasil perikanan yang telah diselesaikan, yaitu satu notifikasi penolakan dari negara Korea atas produk *Frozen Cephalopod* dari PT. Java Seafood, Indramayu, yang

disebabkan nilai TPC diatas ambang batas yang diperbolehkan. Atas notifikasi tersebut seluruhnya telah dilakukan investigasi dan telah dilakukan tindakan perbaikan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Stasiun KIPM Cirebon antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman peraturan perkarantinaaan, keamanan hayati dan sistem mutu, serta melakukan investigasi dan ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh pihak UPI.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu sebesar 95% (*stabilized*), namun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian IKU lingkup BKIPM Tahun 2021, target IKU dalam Renstra Revisi dan PK Tahun 2023 berubah menjadi 92%. Capaian IKU Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 94% atau akhir perencanaan jangka menengah sebesar 106,38%. Realisasi anggaran atas Kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan Ikan yang diselesaikan sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp8.703.500,00 atau 85% dari pagu anggaran sebesar Rp10.240.000,00.

IKU 8 : Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (unit)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* adalah unit usaha perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan sistem *biosecurity* (Cara Karantina Ikan yang Baik), ketertelusuran untuk menjamin kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis. IKU ini dicapai melalui komponen/kegiatan Penetapan IKI dan Pengawasan/ Pengendalian di Instalasi Karantina Ikan. Periode pengukuran IKU ini triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 8 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian ^{*)} %	Target	Capaian ^{*)} %
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i> lingkup (unit)	6	9	9	8	8	9	10	111	9	111

Sumber : Rekapitulasi laporan hasil jumlah IKI yang menerapkan sistem Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan memenuhi standar *Biosecurity*
^{*)} angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada Tahun 2023 telah dilakukan inspeksi penerapan sistem sertifikasi IKI/CKIB baik untuk yang permohonan baru maupun inspeksi perpanjangan sebanyak 10 dari target 9 sertifikat atau capaiannya 111,00%. Inspeksi tersebut menjadi penting karena persyaratan ekspor jenis ikan hias air tawar yang semakin meningkat/ketat dan merupakan kebutuhan implementasi sertifikasi IKI/CKIB dalam menunjang kegiatan ekspor, impor dan antar area. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 111,00% disebabkan ekspor komoditi hasil perikanan yang mulai kompetitif dan memenuhi persyaratan. Upaya nyata yang dilakukan antara lain memberikan layanan bagi pelaku usaha ekspor yang berencana melakukan ekspor secara berkala dan terus memberikan pemahaman jika terdapat perubahan persyaratan/SOP ekspor komoditi hasil perikanan.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan meningkat/bertambah 1 unit setiap tahun, sehingga pada Tahun 2023 ditargetkan 9 sertifikat, sehingga jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini sebesar 100%. Realisasi anggaran komponen/kegiatan dalam rangka pencapaian IKU 8 tersebut sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp42.940.874,00 atau 92,35% dari pagu anggaran sebesar Rp46.500.000,00.

SK 2.1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu, dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dicapai dengan lima IKU, yaitu :

9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)
10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik
11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*
12. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

IKU 9 : Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan telah diterapkan. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif sesuai prinsip-prinsip HACCP. Terbitnya sertifikat CPIB menunjukkan bahwa suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia. Pengukuran dilakukan dengan menjumlahkan sertifikat CPIB yang baru diterbitkan pada tahun berjalan, sertifikat CPIB perpanjangan pada periode tahun berjalan, dan sertifikat CPIB yang masih berlaku. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian ⁾ %	Target	Capaian ⁾ %
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	-	-	-	-	3	5	31	120	5	120

Sumber : Rekapitulasi Jumlah sertifikat CPIB suplier yang berlaku Tahun 2023

⁾ angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerja.kkp.go.id

Pada TA 2023 telah dilakukan Sertifikasi CPIB suplier baik baru maupun perpanjangan sebanyak 31 sertifikat dari target sebanyak 5 sertifikat, sehingga capaiannya sebesar 120%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 120% disebabkan dapat diterbitkannya sertifikat CPIB baru terhadap 5 supplier/*Mini Plant* (MP) selama bulan Januari-Desember 2023 yaitu supplier Sanudi, MP.Chantika, MP.Dayim, MP.Chiko Harjanto, dan MP.Kencana Wulan; 15 supplier/MP perpanjangan; dan 11 supplier/MP terverifikasi. Upaya nyata yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi pemahaman GMP-SSOP dan sertifikasi CPIB secara berkala.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sama setiap tahun (*stabilized*), namun berdasarkan evaluasi Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, pada Tahun 2023 target mengalami peningkatan menjadi 5 sertifikat. Tahun 2023 terealisasi 31 dari target 5 sertifikat, adapun jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini sebesar 120%.

Realisasi anggaran komponen/kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan tersebut sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp29.176.194,00 atau 58,35% dari pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Terdapatnya sisa anggaran sebesar Rp20.823.806,00 (42,65%) yang seharusnya diperuntukkan subkegiatan Bimtek pembuatan manual CPIB bagi suplier yang sumber dananya berasal dari PNBPN, namun tidak dapat direalisasikan karena target penerimaan PNBPN Tahun 2023 tidak tercapai.

IKU 10 : Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BP-POM, Pemerintah Kabupaten/Kota dll. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik dalam rangka Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya di lingkungan perairan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik adalah Kab/ Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Capaian IKU diukur dengan menjumlahkan lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik. Periode pengukuran IKU semester dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Capaian IKU 10 seperti pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 10 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian ¹⁾ %	Target	Capaian ¹⁾ %
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	1	6	2	3	3	3	3	100	3	100

Sumber : Rekapitulasi Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Tahun 2023
¹⁾ angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 10 tersebut memenuhi target Tahun 2023 sebesar 100%, yaitu 3 dari 3 lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik. Monitoring mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan setiap periode semester sekali di Kota Cirebon, Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu. Dengan terjaminnya mutu

perikanan domestik ini, maka setidaknya dapat mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, maka distribusi hasil perikanan untuk konsumsi masyarakat domestik yang harus dijaga mutu dan keamanannya. Upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain melakukan monitoring dan surveilen di sentra-sentra penyediaan produk hasil perikanan domestik.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan 3 lokasi (*stabilized*). Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini sama, sebesar 100,00%. Realisasi anggaran komponen/kegiatan dalam rangka pencapaian IKU 10 tersebut sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp67.127.696,00 atau 85,51% dari pagu anggaran sebesar Rp78.500.000,00.

IKU 11 : Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/Per-BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem *Traceability* (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim UPI yang telah mendapatkan Surat keterangan Penerapan *Traceability*. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU 11 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan sistem <i>traceability</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (UPI)	6	-	4	8	9	8	8	100	8	100

Sumber : Rekapitulasi jumlah UPI yang menerapkan sistem *traceability*

UPI wajib menerapkan sistem ketertelusuran (*traceability*) sebagai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Evaluasi penerapan *traceability* terhadap UPI pada Tahun 2023 telah dilaksanakan terhadap 8 UPI, yaitu PT Java Seafood, PT. Kencana Bintang Terang, PT Jaya Sakti Cirebon, PT. Timur Jaya Cemerlang, PT. Citra Dimensi Arthali, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Suri Tani Pemuka Plant I, dan PT. Pan Putra Samudra. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 100% disebabkan semakin meningkatnya kesadaran UPI dalam menerapkan sistem *traceability* dan adanya upaya nyata yang terus dilakukan Stasiun KIPM Cirebon yaitu dengan dilaksanakannya verifikasi penerapan *traceability* terhadap seluruh UPI yang berada di wilayah administrasi Stasiun KIPM Cirebon secara berkala.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target IKU tersebut setiap tahun menjadi 8 UPI, hal tersebut adanya perubahan jumlah UPI yang beroperasi dan menerapkan *traceability* pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 ditargetkan 8 UPI, oleh karena itu jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran komponen/ kegiatan Monev Penerapan Sistem *Traceability* pada UPI sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp6.444.000,00 atau 92,06% dari pagu anggaran sebesar Rp7.000.000,00.

IKU 12 : *Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (produk)*

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Sertifikasi yang dimaksud mencakup sertifikasi HACCP perpanjangan dan baru, dengan tahapan prosedur: (1) UPI mengajukan permohonan; (2) Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM; Inspeksi oleh Inspektur Mutu; Evaluasi dan rekomendasi tim teknis; (5) Penerbitan sertifikat HACCP; (6) UPI melakukan tindakan perbaikan; (7) Verifikasi tindakan perbaikan oleh Inspektur Mutu. Periode pengukuran IKU ini triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 12 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (produk)	15,00	80,00	56,00	73,00	81,00	55,00	113,00	120,00	55,00	120,00

Sumber : data dari aplikasi haccp.bkipm.kkp.go.id.

*) hasil konversi nilai %capaian IKU (>120%) dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan 13 ruang lingkup baru dari yang sudah ada sebelumnya, yaitu CV. Kerbau Laut 5 produk/ruang lingkup (RL), PT. Oriens Prima Lestari 1 RL, PT. Suri Tani Pemuka 3 RL, PT. Java Seafood 1 RL dan PT. Perdana Investama 3 RL, dan 100 produk/RL lainnya adalah perpanjangan. Capaian keseluruhan Tahun 2023 sebanyak 113 produk atau 120% dari target 55 produk. Angka capaian terhadap target tahunan adalah

120%. Keberhasilan capaian IKU disebabkan bertambahnya ruang lingkup/produk ekspor hasil perikanan sehingga UPI yang mengajukan sertifikasi HACCP produk juga meningkat. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah melaksanakan sertifikasi HACCP untuk ruang lingkup baru dan verifikasi HACCP tahunan atas UPI di wilayah administrasi Stasiun KIPM Cirebon.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan bertambah ruang lingkup/produknya setiap tahun atau pada Tahun 2024 ditargetkan menjadi 55 produk, maka jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini sebesar 120,00%. Realisasi anggaran komponen/kegiatan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp33.238.000,00 atau 94,97% dari pagu anggaran sebesar Rp35.000.000,00.

IKU 13 : UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

UPI yang konsisten dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah UPI yang menerapkan persyaratan dasar serta penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan sistem ketertelusuran. Capaian IKU diukur dengan menjumlahkan UPI yang telah diinspeksi dan diverifikasi penerapan HACCP nya oleh inspektur mutu SKIPM Cirebon. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU 13 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (UPI)	8,00	27,00	11,00	18,00	19,00	18,00	24,00	120,00	18,00	120,00

Sumber : Σ UPI yang telah diinspeksi dan diverifikasi penerapan HACCP nya oleh inspektur mutu SKIPM Cirebon

Nilai capaian IKU tergambar dari jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 yaitu sebanyak 24 unit dari target sebanyak 18 unit atau sebesar 120%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah UPI baru yang melakukan ekspor dan UPI yang makin konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu PT Putra Darmayu Mandiri, PT Lingkar Bahari Perkasa, PT Andalan Samudra Jaya, PT Perdana Investama Mina, dan CV Kerbau Laut. Kebutuhan ekspor yang semakin meningkat mengakibatkan semakin bertambahnya para pelaku usaha komoditi perikanan yang mengajukan permohonan sertifikasi produk yang akan diekspor dengan mengikuti SOP dan melengkapi persyaratan yang diwajibkan.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sama setiap tahunnya (*stabilized*) sebanyak 18 unit. Adapun UPI yang tertib memenuhi persyaratan ekspor menunjukkan pula semakin efektifnya sosialisasi pemahaman kebijakan baru mengenai persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan. Pada Tahun 2024 ditargetkan 18 UPI, maka jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah, maka kondisi capaian per Tahun ini juga sebesar 120%.

Upaya nyata yang telah dilakukan Stasiun KIPM Cirebon antara lain memberikan layanan bagi pelaku usaha ekspor yang berencana melakukan eksportasi serta memberikan pemahaman pembaruan mengenai persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan. Adapun realisasi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp97.752.023,00 atau 97,75% dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

SK 3.1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dapat dicapai dengan empat IKU, yaitu:

14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon
15. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon
16. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon

IKU 14 : Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 14 seperti pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 14 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik (indeks)	-	-	82,98	85,37	88,66	84,00	94,68	113	86,00	110

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat posisi akhir Tahun 2023 yang telah diprogramkan dengan alat bantu kuesioner berbasis digital (<http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>)

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 94,68 merupakan Indeks rata-rata dari keempat indeks triwulanan selama Tahun 2023. Capaian indeks hasil SKM tersebut sebesar 113 atau melebihi dari rata-rata target tahun 2023 yaitu 84,00. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian Tahun 2022 periode yang sama. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan peningkatan pelayanan publik secara prima dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai. Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan survey kepuasan masyarakat sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp23.535.104,00 atau 94,14% dari pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, pada Tahun 2024 target IKU 14 sebesar 86,00 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BKIPM. Survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan secara berkala (triwulanan) sejak Tahun 2000 sesuai dengan mandatori Kementerian PAN dan RB. Capaian per tahun ini atas target akhir jangka menengah (Tahun 2024) sebesar 110. Upaya yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman system perkarantinaan dan penjaminan mutu secara terus menerus kepada para pelaku usaha perikanan, serta berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima.

IKU 15 : Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (parameter)

Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah kegiatan pada laboratorium acuan dalam pemenuhan standar, metodologi dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta penambahan ruang lingkup parameter uji hama penyakit ikan karantina mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Stasiun KIPM Cirebon yang sudah terakreditasi. Salah satu agenda penerapan ISO 17025 adalah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi. Sampai dengan Tahun 2021, Stasiun KIPM mempunyai 20 ruang lingkup pengujian di bidang mikrobiologi yang telah terakreditasi. Formula pengukuran atas IKU ini adalah \sum parameter uji lab untuk kegiatan RSNI, Validasi Metode, KIT Diagnostik, Kontrol positif yang dihasilkan + \sum penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi oleh KAN. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU 15 seperti pada tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU 15 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Cirebon (parameter)	-	-	-	-	-	2	2	100	2	100

Sumber : Laporan kegiatan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Cirebon sesuai target yang ditetapkan sebanyak 2 parameter yaitu VNN dan *Perkinsus olsenii* atau mencapai 100%. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan dorongan untuk meningkatkan kualitas pengujian mutu yg didukung dgn sertifikasi resmi dari KAN. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah melakukan pemutakhiran

Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja, melakukan pengujian dengan menggunakan panduan SNI dan alat yg terkalibrasi, serta didukung oleh personil yang kompeten.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini baru ditetapkan pada Tahun 2023, sehingga belum ada capaian pada periode tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 target IKU tersebut sebanyak 2 parameter, maka kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah mencapai 100%. Realisasi anggaran komponen/kegiatan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Cirebon sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp88.120.857,00 atau 88,12% dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

IKU 16 : Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)

Quality Assurance (QA) merupakan serangkaian proses sistematis guna menentukan apakah suatu produk dan jasa harus memenuhi syarat yang ditentukan. Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk/jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Stasiun KIPM Cirebon juga menetapkan titik lokasi yang dinilai penerapan QA – nya adalah kampung budidaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Kab. Indramayu dan Ciamis. IKU diukur dengan jumlah lokasi usaha perikanan yang menerapkan QA sesuai ketentuan yang berlaku. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 16 seperti pada tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 16 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	-	-	-	-	-	2	2	100	2	100

Sumber : Daftar lokasi usaha perikanan yang menerapkan QA sesuai sistem dan regulasi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* yang sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon sesuai target yang ditetapkan sebanyak 2 lokasi yaitu Kab. Indramayu dan Garut atau mencapai 100%. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan adanya aksi nyata untuk menjamin kualitas hasil perikanan budidaya di sentra-sentra budidaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen KP terkait Kampung Budidaya. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah melakukan monitoring dan verifikasi secara berkala guna pengambilan dan pengujian sampel dalam rangka menjamin kualitas hasil perikanan budidaya.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini baru ditetapkan pada Tahun 2023, sehingga belum ada capaian pada periode tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 target IKU ditetapkan sebanyak 2 lokasi, maka kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah mencapai 100% juga. Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan movev lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* yang sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Stasiun KIPM Cirebon sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp18.515.400,00 atau 51,43% dari pagu anggaran sebesar Rp36.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp17.483.600,00 (49,57%) yang tidak terserap disebabkan tidak dapat terserapnya anggaran tersebut untuk pengujian laboratorium dan Bimtek QA

karena anggaran tersebut bersumber dari PNPB, sedangkan nilai PNPB secara keseluruhan tidak tercapai sesuai target.

SK 4.1
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup BKIPM
(Stasiun KIPM Cirebon)

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan 9 IKU, yaitu:

17. Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon
18. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Cirebon
19. Persentase penyelesaian
20. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon
21. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon)
22. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon
23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon
24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon

IKU 17 : Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)

Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan : (1) Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; dan (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Periode pengukuran IKU ini tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU 19 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	72,54	61,28	86,97	88,03	84,00	88,61	105,49	85	104,24

Sumber : IP ASN KKP yang dihitung oleh Biro SDMAO melalui web ropeg.kkp.go.id

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Cirebon telah diukur secara tahunan pada posisi akhir Tahun 2023 yang bersumber dari ropeg.kkp.go.id, mencapai 88,61 dari target 84,00 atau 105,49%. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022), capaian tersebut mengalami peningkatan indeks, namun target berubah menjadi lebih tinggi yaitu menjadi 84,00 dari target tahun sebelumnya 83,00. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan adanya komitmen Pimpinan dalam memberikan kesempatan kepada setiap pegawainya dalam peningkatan kompetensinya untuk mendukung kinerjanya.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan dengan semakin meningkat setiap tahunnya yaitu mulai dari 75,00 s.d. 85,00 pada akhir Tahun 2024, namun berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2022, maka target Tahun 2023 berubah menjadi 84,00. Realisasi IKU Tahun 2023 sebesar 88,61 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah sebesar 85,00, maka kondisi capaian per Tahun ini telah mencapai 104,24%. Upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain mengidentifikasi kebutuhan pegawai dalam hal peningkatan kompetensi sesuai tusinya dan menugaskan operator simpeg untuk membantu melakukan input data diklat pegawai melalui akun simpeg admin. Sampai dengan akhir TA 2023 terdapat realisasi anggaran dari pengembangan kompetensi SDM mutu sebesar Rp31.222.491,00 atau 98,46% dari pagu anggaran sebesar Rp31.710.000,00 .

IKU 18 : Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Cirebon (nilai)

Penilaian rekonsiliasi kinerja organisasi dilakukan oleh Bagian Program Sekretariat BKIPM, mencakup penilaian atas : (a) **aspek kepatuhan** atas ketersediaan PK, manual IKU, rincian target IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, dan data dukung LKj/LCK; (b) **aspek kesesuaian** antara data dan informasi dalam PK, manual IKU, LCK/LKj, dengan target dan realisasinya dalam PK dan LKj tersebut; (c) **aspek ketercapaian** dalam capaian kinerja IKU dan IK setiap triwulan; dan (d) **aspek ketepatan** waktu dalam penyampaian LKj Tahunan kepada Atasan Langsung dan ke dalam Aplikasi ESR. Pengukuran capaian IKU 18 tersebut dilaksanakan secara tahunan. Periode pengukuran IKU ini tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU 18 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai rekonsiliasi kinerja satker (nilai)	-	-	87,51	87,40	86,39	85,00	97,45	115	85,00	115

Sumber : Hasil penilaian rekonsiliasi kinerja dan dokumen pendukung kinerja oleh Tim Monev Sekretariat BKIPM

Realisasi IKU 18 Tahun 2023 mencapai 97,45 dari target 85,00 atau capaian IKU sebesar 115%. Capaian ini merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Sekretaris BKIPM berdasarkan beberapa kriteria/aspek penilaian kinerja, yaitu kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan waktu pelaporan kinerja. Capaian Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dikarenakan terpenuhinya ketepatan waktu *upload* pelaporan ke dalam aplikasi e sakip/ESR (MenPAN RB), sehingga nilai/skor aspek tersebut mencapai 100%.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan sama pada setiap tahunnya (*stabilized*) sebesar 85,00. Realisasi IKU Tahun 2023 sebesar 97,45 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau

akhir perencanaan jangka menengah sebesar 85,00, maka kondisi capaian per Tahun ini juga mencapai 115%.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain berkoordinasi dengan Tim Akuntabilitas (perencanaan dan monev) dalam rangka rekonsiliasi dokumen, data dan informasi kinerja di lingkup Stasiun KIPM Cirebon. Adapun realisasi anggaran komponen/kegiatan rekonsiliasi kinerja UPT sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp3.000.000,00

IKU 19 : Persentase Penyelesaian Temuan BPK RI lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Formula pengukuran capaian adalah (jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah temuan yang ada) dikalikan dengan 100%. Pengukuran capaian IKU 19 tersebut dilaksanakan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU 19 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup SKIPM Cirebon (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BKIPM Tahun 2022 oleh BPK RI dan tindak lanjutnya

Pada Tahun 2023, persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup Stasiun KIPM Cirebon mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian tersebut disebabkan jumlah nilai temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Tahun 2022 lingkup UPT dan BKIPM telah seluruhnya ditindaklanjuti. Di samping itu, pada TA 2023 UPT Stasiun KIPM Cirebon tidak ada temuan dari BPK RI. Upaya nyata yang dilakukan antara lain melakukan manajemen risiko sebelum menyusun perencanaan anggaran dan melakukan penilaian intern pelaporan keuangan sebelum menyusun Laporan Keuangan. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2023.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ini tidak ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, pada tahun-tahun sebelumnya IKU ini bernama *Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK RI atas LK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)* yang nilai targetnya *stabilized* sebesar $\leq 1\%$. Sejak Tahun 2023 IKU tersebut berubah menjadi *Persentase penyelesaian temuan BPK RI lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)* dengan target 100%. Realisasi IKU 19 pada Tahun 2023 100%, maka jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian per Tahun ini juga mencapai 100%.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain melakukan manajemen risiko menyusun perencanaan anggaran dan melakukan penilaian intern pelaporan keuangan sebelum menyusun pelaporan LK. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2023.

IKU 20 : Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi

objek pengawasan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan. Periode pengukuran IKU/IKS triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU/IKS 20 seperti pada tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU 20 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	100	100	100	75	100	120	75	120

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir Tahun 2023 dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dan memanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Hasil tindak lanjut *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi SIDAK TL Itjen KKP. Sampai dengan akhir Tahun 2023, Stasiun KIPM Cirebon telah memanfaatkan rekomendasi hasil pengawasan sebagai perbaikan kinerja dengan capaian 100% dari target 75% yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 120% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan telah 100% ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon. Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki sistem dan kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan Itjen, antara lain : melaksanakan sertifikasi dan survelen maupun inspeksi sesuai SOP yang ditetapkan. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2023.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan sama pada setiap tahunnya (*stabilized*) sebesar 70%, namun

berdasarkan evaluasi BKIPM Pusat maka target IKU Tahun 2023 ditetapkan 75%. Realisasi IKU 20 pada Tahun 2023 mencapai 100% atau melebihi target 75%, maka jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian per Tahun ini juga mencapai 120%.

IKU 21 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (%)

Nilai IKPA lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Periode pengukuran IKU ini tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Capaian IKU 21 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Nilai IKPA lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	-	-	95,45	98,83	97,76	93,75	96,68	103	89	109

Sumber : hasil penilaian dari *online monitoring* SPAN Kemenkeu RI

Nilai IKPA Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 terealisasi senilai 96,68 dari target 93,75 atau capaiannya sebesar 103%. Nilai IKPA diperoleh dari *web online monitoring* SPAN Kementerian Keuangan dengan indikator pelaksanaan anggaran, yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Capaian tahun ini lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan turunnya nilai dari aspek kualitas perencanaan anggaran, dimana

terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, antara lain Kegiatan Bimtek dan BMK.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan sama (*stabilized*) sebesar 89, namun capaian kinerja secara keseluruhan aspek, target IKPA Tahun 2023 mencapai 109% yang disebabkan tercapainya kualitas perencanaan anggaran masih mencapai 85,99%; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,57%; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%. Upaya nyata yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga penilaian indikator deviasi halaman III DIPA menjadi lebih optimal. Sampai dengan akhir Tahun 2023 realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung capaian penilaian IKPA Tahun 2023 ini sebesar Rp136.863.135,00 atau 99,29% dari pagu anggaran sebesar Rp137.836.000,00.

IKU 22 : Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon

Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah nilai pelaksanaan kegiatan atau output/*outcome* kegiatan berdasarkan PMK No. 249/2011. Periode pengukuran IKU ini tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 22 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	96,09	98,93	-	86,14	86,57	82,00	89,32	109	83,00	107,6

Sumber : hasil pengukuran aplikasi SMART DJA

Nilai kinerja anggaran TA 2023 sebesar 89,32 dari target 82,00 atau capaiannya sebesar 109%. Tercapainya target tersebut disebabkan nilai kinerja penyerapan sebesar 99,39; nilai konsistensi sebesar 99,42; capaian rincian output /CRO sebesar 100; dan nilai efisiensi sebesar 64,26. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan nilai efisiensi tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dimana dengan penyerapan anggaran yang lebih kecil dapat mencapai output sebesar 100%. Nilai kinerja anggaran tersebut mencakup penilaian kinerja anggaran terkait aspek pelaksanaan kegiatan/*output/outcome* yang diukur secara tahunan.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan meningkat setiap tahunnya. Realisasi IKU 22 sebesar 89,32 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah sebesar 83,00, maka kondisi capaian per Tahun ini mencapai 107,6%. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain mengupayakan efisiensi anggaran belanja barang/lainnya sehingga dapat terus meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran tahun berikutnya. Sampai dengan akhir TA 2023, realisasi anggaran komponen/ kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal dalam rangka mendukung capaian penilaian NKA Tahun 2023 ini sebesar Rp61.394.636,00 atau 93,43% dari pagu anggaran sebesar Rp65.500.000,00.

IKU 23 : *Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)*

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BKIPM diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- (1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- (2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- (3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- (4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Periode pengukuran IKU 25 dilakukan tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU 23 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (%)	-	-	-	-	80,82	77,5	81,66	105	77,5	105

Sumber : Hasil evaluasi oleh Sekretariat BKIPM KKP Tahun 2023

Aspek pengukuran tingkat kepatuhan PBJ tersebut mencakup ketersediaan manajemen risiko PBJ yang strategis, perencanaan dan persiapan pengadaan, persentase PBJ yang dilakukan melalui SPSE, kesesuaian tahap pelaksanaan, laporan penyelenggaraan PBJ, dan persentase tindak lanjut hasil pengawasan atas PBJ. Realisasi IKU 23 Tahun 2023 sebesar 81,66% dari target 77,50% atau capaiannya sebesar 105%. Keberhasilan tersebut berdasarkan hasil evaluasi BKIPM kepada Stasiun KIPM Cirebon yang mendapatkan nilai berdasarkan bobot aspek : Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebesar 8,35; Perencanaan dan Persiapan Pengadaan sebesar 10,40; Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE sebesar 6,70; Kesesuaian Tahap Pelaksanaan sebesar 37,46; Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 3,75; Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2022 sebesar 15,00. Upaya nyata yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Cirebon antara lain dengan menyusun dokumen PBJ yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan pedoman penilaian secara lengkap.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan mulai Tahun 2022 (Renstra revisi Tahun 2022-2024) dengan target meningkat dari 75% menjadi 77,5% pada Tahun 2023. Realisasi IKU 22 sebesar 81,66% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah sebesar 77,50%, maka kondisi capaian per Tahun ini juga mencapai 105%. Sampai dengan akhir TA 2023, realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dalam rangka

mendukung capaian penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ ini sebesar Rp193.027.800,00 atau 98,82% dari pagu anggaran sebesar Rp196.660.000,00.

IKU 24 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan bahwa telah dikelolanya BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BKIPM diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : (1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%); (2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); (3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%); (4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan (5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%). Periode pengukuran IKU/IKS 26 dilakukan tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU 24 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%)	-	-	-	-	100	77,50	99,38	120	77,50	120

Sumber : Hasil evaluasi/penilaian oleh Sekretariat BKIPM KKP Tahun 2023

Realisasi IKU 24 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 mencapai 99,38% atau 120% dari target sebesar 77,50%. Keberhasilan tersebut berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan oleh Tim BKIPM Pusat atas parameter : pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 sebesar 12,5%; tersedianya usulan penetapan status

penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang sebesar 25%; tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 25%; penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian sebesar 25%; dan penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu sebesar 12,5%. Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah melakukan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, tertib dan pendokumentasian secara lengkap.

Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, target IKU ditetapkan mulai Tahun 2022 (Renstra revisi Tahun 2022-2024) dengan target sama setiap tahunnya (*stabilized*) yaitu 75%. Realisasi IKU 24 Tahun 2023 sebesar 99,38% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah sebesar 77,50%, maka kondisi capaian per Tahun ini masih tetap mencapai 120%. Sampai dengan akhir TA 2023, realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung Pengelolaan BMN sebesar Rp44.872.809,00 atau 98,89% dari pagu anggaran sebesar Rp45.420.000,00.

C. REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Tahun 2023 tersaji pada Lampiran 1.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2023 berjumlah sekitar 44 komponen/kegiatan. Sampai dengan akhir Tahun 2023, seluruh komponen/

kegiatan telah mencapai target setahun ini bahkan melampaui target sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi terakhir tanggal 7 November 2023. Katimja dan Penanggung Jawab kegiatan berupaya atas pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu rencana pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian 24 IKU terbagi menjadi 3 periodik yaitu triwulanan, semesteran, dan tahunan.

D. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN TA 2023

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon s.d. akhir TA 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp8.629.187.472,00 atau 96,39% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp8.952.427.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp323.239.528,00 atau 3,61%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s.d. Desember Tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 96,98%.

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, Stasiun KIPM Cirebon juga dituntut untuk memperhatikan indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran negara yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud antara lain ekonomis, efisien, dan efektif. Indikator efektivitas berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Dengan mengacu pada kriteria tersebut, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Stasiun KIPM Cirebon telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien, sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Stasiun KIPM Cirebon yang dirumuskan sesuai

dengan kebutuhan KKP, mitra kerja, dan BKIPM. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran juga telah melalui proses reviu yang dilaksanakan oleh BKIPM dan Itjen KKP yang bertugas untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan perkarantinaan dan mutu hasil perikanan, Stasiun KIPM Cirebon menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran diawasi secara berkala oleh Itjen KKP untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM berkualitas dengan biaya yang sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2023, diketahui bahwa dari 24 IKU yang ditetapkan sebagai hasil program, sebanyak 15 IKU dapat dicapai melebihi target dan 9 IKU lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian IKU tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 yang ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 107,65% atau di atas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, serta Dukungan Manajemen, terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh Pimpinan beserta tim pengelola kinerja Stasiun KIPM Cirebon.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program Tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian output dan capaian kinerja organisasi (NPSS). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Cirebon dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan dengan input anggaran yang lebih kecil (96,39% dari seluruh

anggaran) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja Output

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 96,39% sedangkan capaian output dari masing-masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 3,61% dalam menghasilkan output dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi Tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Stasiun KIPM Cirebon digunakan secara efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil (96,39%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 107,65%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 11,26% (= NPSS – %Input).

Tabel 28. Efisiensi Anggaran Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 per jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (Input)	Realisasi Hasil		Efisiensi
	Output	100%	
96,39% dari alokasi anggaran Rp8.952.427.000,00	Kinerja	107,65%	3,61 %
	Organisasi (NPSS)		11,26 %

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas yang berazas efisien, efektif, dan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi juga diperoleh dari tercapainya target indikator kinerja pada beberapa kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan dengan anggaran yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon mulai awal tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan dan target tahun sebelumnya, serta target akhir perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 tersebut, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023 kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai **107,75**.
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan rata-rata capaian empat Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 24 IKU. Dari 24 IKU tersebut, sebanyak 15 IKU dapat dicapai melebihi target dan 9 IKU tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Beberapa capaian kinerja yang mendapatkan nilai positif dalam mendukung kinerja BKIPM dan KKP antara lain (a) Stasiun KIPM Cirebon ditetapkan sebagai salah satu UPT yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP; (b) Stasiun KIPM Cirebon dapat mempertahankan sertifikasi ISO dan mengimplementasikan ISO secara terintegrasi yaitu ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017, dan ISO 9001:2015; (c) Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM kategori tinggi; (d) Persentase penyelesaian temuan BPK mencapai 100%; (e) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; (f) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

mencapai 96,98; (g) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang melebihi target sebesar 89,32; dan (h) nilai rekonsiliasi kinerja Stasiun KIPM Cirebon yang melebihi target yaitu 97,45 .

4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran TA 2023 yaitu mencapai Rp8.629.187.472,00 atau 96,39% dari pagu anggaran senilai Rp8.952.427.000,00, sehingga sisa anggaran senilai Rp323.239.528,00 atau 3,61%. Bila realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang mencapai 107,65% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran cukup efisien karena dengan penggunaan input anggaran di bawah pagu tersedia, dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih besar dari 100%.

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon selama Tahun 2023, bahwa tidak seluruh sub kegiatan/sub komponen dan anggarannya dapat direalisasikan sebagaimana tercantum dalam RKA K/L TA 2023, hal tersebut karena terdapat sub kegiatan tersebut bersumber Dana PNBP dimana realisasi penerimaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi internal dan global yang *uncontrollable*, seperti kecenderungan permintaan pengiriman ekspor Tahun 2023 oleh pengguna jasa ke negara mitra/non mitra yang mengalami penurunan sehingga pengajuan permohonan sertifikat kesehatan ikan/HC juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan PNBP dilingkup Stasiun KIPM Cirebon yang hanya mencapai Rp542.470.000,00 atau 62,03% dari target Rp874.540.000,00. Dengan tidak tercapainya target PNBP maka beberapa kegiatan yang bersumber dana dari PNBP tidak dapat direalisasikan.

C. RENCANA PERBAIKAN

Terhadap permasalahan tersebut sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada periode tahun berikutnya, langkah perbaikan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan berikutnya adalah mempertimbangkan secara selektif dalam menyusun

anggaran kegiatan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian output organisasi.

D. TINDAK LANJUT RENCANA PERBAIKAN TAHUN 2022

Atas rencana perbaikan periode tahun sebelumnya, berikut tindak lanjut yang telah diselesaikan pada Tahun 2023, yaitu :

1. Realisasi PNBP TA 2023 mencapai Rp542.470.000,00 atau 62,03% dari target PNBP Rp874.540.000,00; sehingga pembiayaan belanja kegiatan yang bersumber dari anggaran PNBP telah dioptimalkan sebesar Rp352.694.460,00 atau 58,53% dari pagu penerimaan.
2. Berupaya melakukan koordinasi dengan Sekretaris BKIPM melalui Ka Timja Perencanaan dalam pengajuan usulan dan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga dapat dipedomani dalam menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2023.

LAMPIRAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Target Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan												
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	
	24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Pengadaan Meubelair Ruang Pelayanan	13.560.000	Unit	6				6									
		Pengadaan Pagar Keliling Kertajati	183.100.000	Paket	1			1										
		Pengadaan Alat Uji Laboratorium-RM	281.383.000	Unit	2			2										
		Pengadaan Alat Uji Laboratorium-PNBP	130.629.000	Unit	4											4		
		Pengadaan Pendingin Ruang Pelayanan dan Laboratorium-RM	63.000.000	Unit	7			7										
		Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung Ruang Pelayanan dan Laboratorium	67.220.000	Unit	4											4		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	98.600.000	Unit	3							2						1
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	24.000.000	Unit	8							4						4
		Pemeliharaan Gedung Kantor	199.880.000	Paket	1							1						
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	69.250.000	BLN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	680.000.000	Paket	4							4						
			25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Penghapusan BMN	2.076.000	Dokumen	1						1					
Perjalanan Pengelolaan BMN	9.140.000			Orang	1												1	



Cirebon, 26 Januari 2023
Kepala SKIPM Cirebon

R. Rudi Barmara, S.Pi.,M.P.
NIP. 19690414 199203 1 005



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. Rudi Barmara**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

R. Rudi Barmara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM CIREBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	9
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Unit)	9
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (Sertifikat)	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	8
		12	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Produk)	55
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	84
		15	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Parameter)	2
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2

KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	85
		19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	93,75
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	82
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	77,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.110.512.000
	Pengendalian Mutu	1.110.512.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.164.920.000
	Karantina Ikan	421.920.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	743.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	6.676.995.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	6.676.995.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Tahun 2023		8.952.427.000

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua

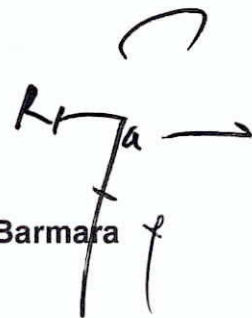
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon



R. Rudi Barmara

**LAMPIRAN
DATA PENDUKUNG TINDAK
LANJUT RENCANA AKSI TAHUN
SEBELUMNYA**

PK 2023 - Google Drive

bit.ly

Yth. Bapak/Ibu

Dimohon untuk menyusun dokumen **PK 2023** :

1. Dokumen **PK 2023**, paling lambat dikumpulkan tanggal **30 Januari 2023**.
2. Dokumen **PK 2023**, ttd **25 Januari 2023**
3. Dokumen yang dikumpulkan, berupa : **Word dan PDF (yang sudah dittd Kepala Satker) TIDAK DISTEMPEL** dikumpulkan ke drive : https://bit.ly/PK2023_UPTBKIPM dan **dikirimkan file asli ttd Kepala Satker (2rangkap) ke Sekretariat BKIPM cq. Koordinator Program**

Koordinator Program

Sekretariat BKIPM

d.a

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6

Sekretariat Badan Karantina Ikan

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

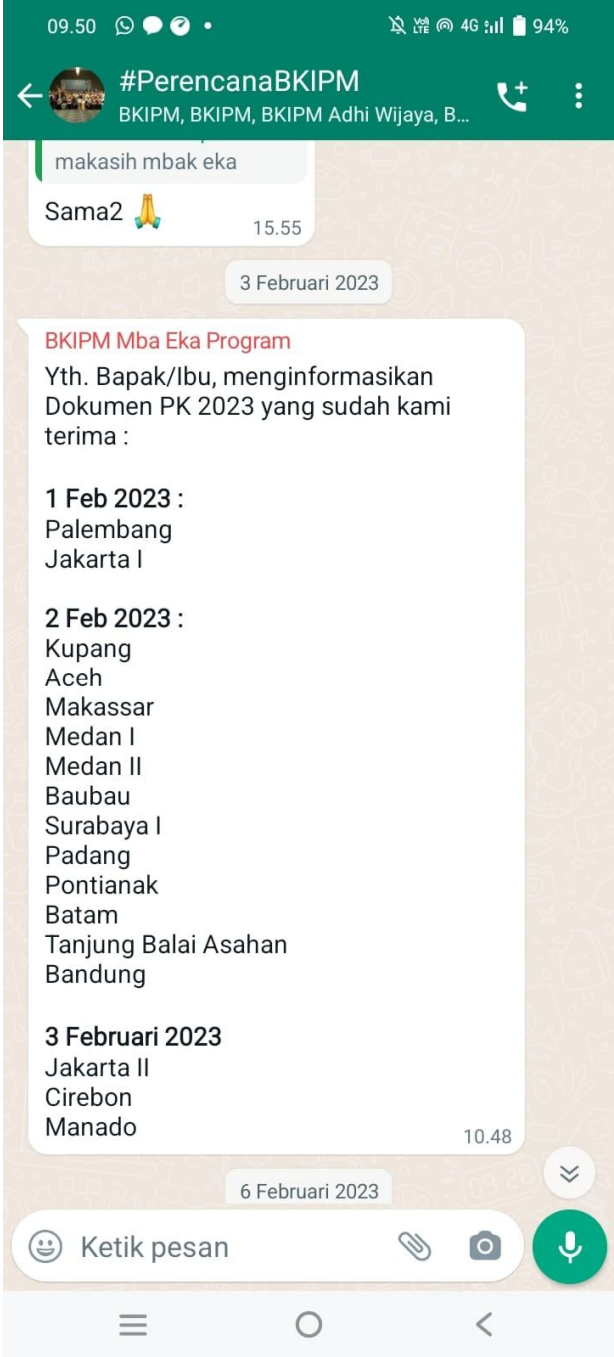
Jalan Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta 10110

4. **Target indikator kinerja berpedoman pada target yang telah ditetapkan oleh satker Pusat lingkup BKIPM TA. 2023** pada link <https://bit.ly/MatriksCascadingIndikatorKinerja2023> (Apabila ada yang ditanyakan tentang target indikator kinerja, dipersilakan menghubungi pusat pengampu IKU masing2).

Demikian disampaikan, diucapkan terima

SCREENSHOT PENGIRIMAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



BUKTI PENGIRIMAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

 Nomor Connote : CBNEC06271373123		
		
Pengirim : STASIUN KARANTINA IKAN JL CIDENG INDAH NO 236A KEDAWUNG , CIREBON, 45143 +6285729864265	YES	KREDIT
Penerima : KOORDINATOR PROGRAM SEKR BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL MEDAN MERDEKA TIMUR NO 16, GAMBIR ,JAKARTA PUSAT, +6285691730058	15000	
Deskripsi : DOC	Tanggal : 01-02-2023 17:37 No. Pelanggan : 10966500 Kota Asal : Cirebon berat : 1 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : Doc Pembayaran : Kredit	CGK-PST-01
Instruksi Khusus :		
 CBNEC06271373123	Tanggal : 01-02-2023 17:37 No. Pelanggan : 10966500 Deskripsi : DOC	Berat : 1, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : 15000 Kota Tujuan : Gambir, Jakarta Pusat
 YES	Pengirim : STASIUN KARANTINA IKAN Penerima : KOORDINATOR PROGRAM SEKR BKIPM	Asuransi : Tidak Diantar Maks : 02-02-2023

Dengan menyerahkan kiriman, Anda setuju syarat & ketentuan yang terdapat pada www.jne.co.id



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. Rudi Barmara**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Cirebon


R. Rudi Barmara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KIPM CIREBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	9
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Unit)	9
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (Sertifikat)	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	8
		12	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Produk)	55
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	84
		15	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Parameter)	2
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	2

KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat menuju WBK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Unit)	1
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	≤ 0,5
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	89
		23	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	970.512.000
	Pengendalian Mutu	970.512.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.304.920.000
	Karantina Ikan	421.920.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	883.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	6.559.773.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	6.559.773.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Tahun 2023		8.835.205.000

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Cirebon


R. Rudi Barnara

Drive

+ Baru

- Beranda
- Drive Saya
- Komputer
- Dibagikan kepada saya
- Terbaru
- Berbintang
- Spam
- Sampah
- Penyimpanan

Telusuri di Drive

Dibagikan kepada saya > PK 2023

Jenis Orang Dimodifikasi

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
Entikong	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Denpasar	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Cirebon	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
BUSKI	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Bima	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Bengkulu	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Baubau	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Batam	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Banjarmasin	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-
Bandung	Tidak dapat memuat pen...	27 Jan 2023	-

9,21 GB dari 15 GB telah digunakan

Dapatkan penyimpanan ekstra